

# **Kebijakan Pembangunan Wilayah Berbasis Pengelolaan Das**

As recognized, adventure as skillfully as experience nearly lesson, amusement, as well as concord can be gotten by just checking out a books **Kebijakan Pembangunan Wilayah Berbasis Pengelolaan Das** then it is not directly done, you could acknowledge even more concerning this life, in this area the world.

We pay for you this proper as without difficulty as simple quirk to get those all. We meet the expense of Kebijakan Pembangunan Wilayah Berbasis Pengelolaan Das and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this Kebijakan Pembangunan Wilayah Berbasis Pengelolaan Das that can be your partner.

## Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro - Hayat 2018-09-01

Kebijakan publik mengalami berbagai tantangan yang semakin kompleks dan komprehensif. Intervensi politik yang semakin menguat seiring dengan menguatkan reformasi birokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kebijakan publik mempunyai porsi yang cukup ideal dalam penyelenggaraannya, mulai dari formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Tetapi dalam

perkembangannya, tidak cukup dengan tiga kerangka kebijakan publik di atas. Dalam konteks penentuan formulasi kebijakan dibutuhkan reformasi kebijakan (policy reform) yang berguna untuk mengontrol hasil dari evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak serta-merta menjadi bahan dalam formulasi kebijakan. Dibutuhkan sebuah konsep ulang dalam penyusunan formulasi kebijakan, yaitu reformasi kebijakan publik sebagai langkah konkret untuk menemukan formula baru, mengganti formula yang ada, atau memperbaiki formula yang sudah ada. Pasca evaluasi kebijakan, ada tahapan reformasi

kebijakan yang harus dilakukan sebagai proses kebijakan yang tidak terputus. Reformasi kebijakan melakukan analisis terhadap kebijakan yang sudah dijalankan apakah dilanjutkan, dihentikan, diganti atau dibutuhkan kebijakan baru. Pada akhirnya adalah good governance sebagai goal dari semua konsep kebijakan publik. Good governance sebagai tujuan akhir dari rangkaian penyelenggaraan kebijakan publik. Good governance sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah harapan semua komponen bangsa, di situlah

nilai-nilai kemaslahatan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. ----- Sebuah buku tentang kebijakan publik / politik / sistem pemerintahan persembahkan penerbit Kencana (PrenadamediaGroup) [Mewariskan Kota Layak Huni](#) - Nirwono Joga 2017-03-13 Indonesia telah turut menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 dan Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda/NUA) 2036. Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, dengan

tema "Urbanisasi Berkelanjutan" (Sustainable Urbanization), menegaskan kembali komitmen negara-negara di dunia. Menghadapi fenomena pemanasan global, perubahan iklim, dan degradasi kualitas lingkungan hidup, implementasi SDGs 2030 dan NUA 2036 merupakan langkah penting untuk mewujudkan kota layak huni secara terpadu dan berkelanjutan, serta melibatkan multi-pemangku kepentingan berbasis kemitraan. Untuk itu, diperlukan langkah nyata Aksi Baru Perkotaan Indonesia (Indonesia New Urban Action/INUAct) yang kesemuanya terangkum dalam buku ini.

Ruang Air dan Tata Ruang - Pitojo Tri Juwono

2017-09-30

Buku ini memberikan perspektif tentang pentingnya ruang air, mengingat salah satu sifat air mengalir ketempat yang lebih rendah dan di sisi lain pemanfaatan ruang terus bertambah dan berkembang. Jika hal ini tidak diperhatikan dalam konsepsi pembangunan berkelanjutan maka ancaman permasalahan banjir akan menjadi agenda tahunan perkotaan yang sulit ditangani. Permasalahan sumber daya air tidak hanya banjir, tetapi makin kompleks di antaranya penurunan muka air tanah, pencemaran air tanah

maupun badan air. Permukaan air tanah terus mengalami penurunan karena pemanfaatan air tanah yang berlebihan dan belum ada upaya untuk menyimpan/menabung air. Kebijakan penanganan banjir perlu dilakukan secara komprehensif dan bukan parsial. Hujan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan mempercepat aliran air menuju saluran. Beberapa upaya penting yang bisa dilakukan antara lain: 1) Perencanaan drainase ramah lingkungan (eko-drainase) yang terkoneksi dengan saluran utama, 2) Konservasi lahan di kawasan daerah aliran

sungai, 3) Pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) 30% dari luas perkotaan sebagai kawasan resapan air, 4) Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang efektif, serta 5) Peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya air. Buku ini selain bersifat teoritis juga menyajikan hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan tema ruang air dan tata ruang.

**Skema Inovatif Model Pengembangan Kampung**

**Tematik - Sugiyanto 2020-06-01**

Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di Dunia yang memiliki lebih dari 17.504

pulau dengan lokasi terbentang luas dari sabang sampai merauke. Sebagai Negara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah sudah seharusnya menjadi kekayaan dan keunggulan Indonesia untuk menjadi peluang peningkatan sektor pariwisata guna pengembangan wilayah. Konsekuensi dari posisi Indonesia yang strategis yaitu bagaimana optimalisasi pemanfaatan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan bagi masyarakat. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadi potensi yang sangat besar. Potensi ini dapat dilihat dari keindahan pulau yang

terbentang dari ujung barat sampai ujung timur. Keindahan alam menjadi salah satu keunggulan, khususnya wisata bahari Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Tantangannya adalah meningkatkan peran stakeholders yang ada di Indonesia untuk mengupayakan nilai tambah (creating values) dalam pengembangan sektor pariwisata. Skema Inovatif Model Pengembangan Kampung Tematik ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN -**

Dr. Sarintan Efratani Damanik, M.Si

Dengan buku ini diharapkan pembaca mengetahui secara mendasar yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan Kehutanan. Dan tulisan ini untuk mendalami ilmu Perencanaan Kehutanan dan Percepatan Pembangunan di bidang kehutanan.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Konsep dan Teori) - Tamaulina Br. Sembiring, S. H., M. Hum., Ph.D 2022-01-31

Judul : PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Konsep dan Teori) Penulis : Tamaulina Br. Sembiring, S. H., M. Hum., Ph.D Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 115 Halaman No ISBN :

978-623-5687-88-9 SINOPSIS Bab pertama membahas tentang Pendahuluan. Bab kedua membahas tentang Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan yang meliputi Pengertian Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Prinsip Dasar Pembangunan berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, dan Landasan Hukum Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan. Bab ketiga membahas tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yang meliputi Prinsip-Prinsip Hukum Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Ekosistem DAS dan Asas, Tujuan dan

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bab keempat membahas tentang DAS, Garis Sempadan Sungai dan Kelestarian Lingkungan yang meliputi Ekosistem DAS, Ekosistem Tanah, Asas-Asas Pengelolaan Daerah Aliran Sempadan Sungai (DAS). Bab kelima membahas tentang Tanah Di Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai yang meliputi Maksud Tanah di Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai, Tujuan Tanah di Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai, Fungsi Tanah di Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai, Pentingnya Pengelolaan DAS Terpadu dan

Sumber Daya Alam (SDA) Lahan (Tanah). Bab keenam membahas tentang Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Autonomi Daerah yang meliputi Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Meningkatkan Peranan Institusi Pengelolaan DAS, Dominasi (Determinisme) Lingkungan pada Kehidupan Manusia, Teori Tentang Kesadaran Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep dan Teori).

*Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dalam Tata Kelola Akuakultur Edisi 1* - Cocon, S.Pi, M.Si  
Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dalam



Tata Kelola Akuakultur Edisi 1 PENULIS: Cocon,  
S.Pi, M.Si Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :  
978-623-270-484-8 Terbit : Juli 2020  
[www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Sinopsis: Tantangan terbesar  
yang akan dihadapi dalam pemanfaatan sektor  
yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan  
adalah fenomena degradasi kualitas lingkungan  
dan perubahan iklim global. Akuakultur dengan  
nilai strategis ekonomi dan tumpuan bagi  
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat global  
menjadi salah satu yang dihadapkan pada  
tantangan tersebut. Fenomena tantangan ini,  
telah memicu kesadaran negara-negara di dunia

untuk mulai berpikir bagaimana agar sumberdaya  
alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.  
Demikian halnya, dalam konteks sumberdaya  
akuakultur, kita harus mulai merubah pola  
pengelolaan ke arah yang lebih dapat  
dipertanggungjawabkan. Buku ini edisi pertama  
ini memberikan gambaran bagaimana  
perkembangan akuakultur global dan nasional,  
potensi dan tantangannya, serta memberikan  
arahan dari perspektif pembangunan  
berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya  
akuakultur secara komprehensif.  
[www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Email : [guepedia@gmail.com](mailto:guepedia@gmail.com)

WA di 081287602508 Happy shopping & reading  
Enjoy your day, guys

### **Jagat Biru Rahayu Lingkungan dan Kehidupan**

**Bermartabat - Cahyono Agus 2019-01-08**

Planet biru kita terdiri atas samudra biru seluas 72% dan langit biru lebih dari 95%. Mestinya, harus juga didukung oleh bumi biru, sebuah bumi hijau asri yang mampu mendukung terciptanya langit dan laut biru. Jagat biru rahayu merupakan satu-satunya planet kecil dalam sistem tata surya kita, sebagai tempat hidup bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Konsep ekonomi biru dikembangkan oleh Gunter

Pauli dari ZERI Foundation (2009), menawarkan efisiensi investasi, peningkatan inovasi, peningkatan dana, penciptaan lapangan kerja, pembangunan modal sosial, stimulasi kewirausahaan. Dilakukan dengan pemanfaatan sampah dan barang terbuang, menjadi makanan, energi dan pekerjaan, sehingga mengubah kemiskinan menjadi pembangunan berkelanjutan, dan kelangkaan menjadi ketersediaan. Ekonomi Biru telah memberikan kesempatan kreatif dan inovatif baru yang berkelanjutan, bersih, dan bermartabat. Revolusi Biru dapat diperjuangkan dengan sungguh-

sungguh melalui revolusi total di bidang mental, teknologi, dan pengelolaan agar terjadi pemberdayaan 6M (man, money, material, machine, method, management) sehingga terbangun lingkungan dan kehidupan yang lebih bermartabat dan berkelanjutan. Dilakukan melalui percepatan proses siklus alami dengan pemberdayaan sumber daya lahan (tanah, air, mineral), hayati (tumbuhan, binatang, manusia), dan lingkungan agar mempunyai nilai tambah ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan pengelolaan berkelanjutan. Konsep filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dilakukan dengan

membuat bumi rahayu dan lestari melalui Konsep Tri Satya Brata, yaitu: (i) Rahayuning Bawono Kapurbo Waskhinating Manungso, (ii) Dharmaning Satrio Mahanani Rahayuning Nagoro, (iii) Rahayuning Manungso Dumadi Karono Kaluhuran Derajat. Buku berjudul jagat Biru Rahayu: Lingkungan dan Kehidupan Bermartabat ditulis oleh para pakar dan praktisi dari akademisi, LSM, pemerintah, dan bisnis. Buku ini mengupas tuntas tentang Revolusi Biru untuk menjadikan jagat bumi rahayu yang memerlukan komitmen, tanggung jawab, dan peran aktif kita semua, demi terbentuknya

lingkungan dan kehidupan yang semakin bermartabat dan berkelanjutan.

### **Biologi Lingkungan - Efri Roziaty**

Ilmu Biologi Lingkungan adalah salah satu cabang dari Ilmu Biologi khususnya Ekologi yang membahas tentang segala sesuatu yang berada di sekitar kita baik berupa benda hidup atau tak hidup. Termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya. Ruang lingkup ilmu Biologi Lingkungan cukup luas yaitu botani, zoologi, geologi, geogra , ilmu-ilmu sosial dan medis, pariwisata, dan lain sebagainya. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berisi tentang

cakupan materi Biologi dan lingkungan yang disiapkan untuk membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran Biologi Lingkungan. Buku yang membahas tentang ekologi sebagai dasar Biologi Lingkungan di dalamnya tercakup ekologi dan lingkungan. Ekologi: organisme di lingkungan, populasi, komunitas, dan komunitas biotik, ekosistem. Lingkungan: wawasan dan etika lingkungan, prinsip-prinsip lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, pencemaran dan bioindikator lingkungan, serta beberapa kasus yang terkait pencemaran lingkungan berupa contoh kasus-

kasus lingkungan. Materi pengayaan: pengelolaan lingkungan khusus di bidang kesehatan lingkungan. Sehingga, dengan disusunnya buku ini diharapkan mahasiswa dan khalayak mampu memiliki wawasan tentang lingkungan yang lebih baik.

Pedoman pengelolaan ekosistem mangrove -

2008

Management of mangrove ecosystems in Indonesia.

Pengelolaan taman nasional dalam era otonomi daerah - Herman Hidayat 2007

Managing national parks and reserves in

Sulawesi Tenggara and Utara.

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-... Proklamasi kemerdekaan RI di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Indonesia. President 2010

Akuakultur dalam Perspektif Pembangunan

Berkelanjutan - Cocon, SPi, MSi 2019-01-01

Buku ini memberikan gambaran bagaimana seharusnya melakukan pola pemanfaatan sumberdaya akuakultur secara bertanggungjawab dan berkelanjutan dalam kerangka implementasi

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) Bagian, dimana substansi diambil dari gagasan pribadi penulis berdasarkan rujukan dari berbagai sumber ilmiah (nasional dan internasional), isu-isu terbaru dan fakta-fakta di lapangan

**Antologi Dari Bumi Paguntaka: Perspektif Minda**

**Akademia UBT - Taufiq A. Gani 2020-07-24**

Berinovasi, mengubah dunia dan membangun sesuatu serta menginspirasi, maka kita harus berada pada mode entrepreneur. Mode ini mengembangkan ruang yang benar-benar kita

miliki, orang-orang akan merasa terhormat untuk berdiskusi dengan kita, kita akan bisa memecahkan masalah besar dan penting serta membuat perbedaan bagi banyak orang. Mode entrepreneur menjadikan kita memiliki empati, logika, penalaran, dan kesadaran yang lebih tinggi. Mode otak entrepreneur memiliki kapasitas secara harfiah untuk mencintai dunia dan semua orang di dalamnya tanpa memikirkan jarak dan waktu serta bisa melihat masa depan. Mode ini dapat menarik wawasan unik dari masa lalu kita sendiri atau orang lain dan secara alami menyusun strategi yang sering sekali berbeda

dan berada di luar pemahaman. Sebagai dosen, mode otak ini menjadi sangat penting karena sebagai pendidik kita harus bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan yang akan digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat di masa depan. Dosen harus menjadi seseorang yang bisa menginspirasi, memberikan dorongan untuk kepada mahasiswa, masyarakat dan institusi untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Buku ini merupakan kumpulan artikel terkait hasil pemikiran dosen UBT yang diharapkan mampu memotivasi dosen lainnya dalam menuliskan buku.

*PENGLOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI :  
Studi di Kawasan DAS Kabupaten Langkat -  
Tamaulina Br. Sembiring, S. H., M. Hum., Ph.D  
2022-01-31*

Judul : PENGLOLAAN DAERAH ALIRAN  
SUNGAI : Studi di Kawasan DAS Kabupaten  
Langkat Penulis : Tamaulina Br. Sembiring, S. H.,  
M. Hum., Ph.D Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal :  
117 Halaman No ISBN : 978-623-5687-89-6

SINOPSIS Buku ini membahas Pengelolaan  
Daerah Aliran Sungai (Studi di Kawasan DAS  
Kabupaten Langkat). Buku ini penulis  
kontribusikan untuk Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai di Indonesia khususnya di Kabupaten Langkat. Buku ini terdiri dari lima bab. Bab pertama membahas tentang Pendahuluan. Bab kedua membahas tentang Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai. Bab ketiga membahas tentang Masalah Lingkungan Hidup Di Kawasan DAS di Kabupaten Langkat. Bab keempat membahas tentang Penyebab Kegagalan Pengelolaan Das Di Kabupaten Langkat yang meliputi, Lemahnya penegakan Hukum dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan DAS, Faktor Kultur (Budaya) Hukum masyarakat di Kabupaten Langkat, Rendahnya Kesadaran

Hukum Masyarakat akan Pentingnya Ekosistem Kawasan DAS, Belum Adanya Peraturan daerah Kabupaten Langkat tentang alam sekitar (lingkungan hidup) dan ekosistem DAS dan Masalah Yang dihadapi Pemerintah dan Pengusaha yang ada di Kabupaten Langkat. Bab kelima membahas tentang Pengaturan Konservasi DAS di Kabupaten Langkat.

**Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Permukiman - R. Pamekas 2013-01-02**

Buku ini membahas persoalan dan solusi permasalahan pembangunan (Bangun) dan pengelolaan (Kelola) Infrastruktur Kawasan



Permukiman (BK-Infrakim) dengan menggunakan suatu alat bantu (instrument) yang disebut model. Infrastruktur suatu kawasan Permukiman diperlukan untuk mempertahankan diri dari persaingan internasional, mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta kesejahteraan masyarakat. [Pustaka Jaya, Dunia Pustaka Jaya]

Meretas kebuntuan : konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia - Moeliono, M. Limberg, G. Minnigh, P. Mulyana, A. Indriatmoko, Y. Utomo, N.A. Saparuddin Hamzah Iwan, R. Purwanto, E.

*Tata Ruang Air* - Robert J. Kodoatie 2010

On integrated water resource management in Indonesia.

*Tabangun Aceh - Edisi 46* - 2015-05-11

Revisi RPJMA untuk Rasionalisasi Target

Pencapaian target adalah variabel terpenting dalam pembangunan. Penetapan target-target ini, sebagaimana termaktub dalam struktur dokumen perencanaan mulai dari RPJP, RPJMA, hingga Rencana Kerja (Renja), adalah proyeksi keberhasilan pembangunan yang harus diupayakan tercapai oleh SKPA sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sebagai proyeksi

yang inheren dalam proses perencanaan pembangunan, maka tentu target-target pembangunan ini ditetapkan sebagai gambaran ideal. Ia menjadi ideal untuk dicapai dan diwujudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berhasil membawa perubahan atau kemajuan ke arah yang lebih baik. Namun tentu dinamika pembangunan pada kenyataannya sering membawa implikasi perlunya langkah-langkah penyesuaian terhadap target-target capaian ini agar lebih achievable. Inilah dasar pikir perlunya dilakukan revisi terhadap target-target pembangunan Aceh sebagaimana

termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (2012-2017) dan yang tertera dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2013. Ini adalah proses yang normal dan menjadi bagian dari evaluasi tahunan terhadap pencapaian target RPJMA. Ketika dinilai tidak mencapai target, maka perlu dievaluasi untuk dikaji ulang dan direvisi dengan target dan angka-angka yang lebih realistis tentu dengan melihat dan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang kita miliki. Revisi RPJMA Aceh (2012-2017) di sisi lain sesungguhnya juga tidak dapat dipisahkan dari transisi pemerintahan di

tingkat nasional yang kemudian melahirkan program atau kebijakan pembangunan baru yang menuntut penyesuaian di tingkat daerah-daerah. Jika kita bicara dasar hukum, maka langkah revisi ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada tahap selanjutnya hasil revisi akan disepakati bersama-sama antara eksekutif dan legislatif untuk untuk kemudian ditetapkan dengan qanun.

Ilmu Lingkungan - Sri Gusty 2023-04-25

Hukum Perbatasan Darat Antar Negara - Saru Arifin 2022-07-29

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara teoretis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antarnegara dengan setting kasus perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teori dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) secara utuh, sehingga bisa menumbuhkan semangat nasionalisme yang rasional, dan tidak mudah tersulut oleh permainan isu mengenai perbatasan negara tanpa mengetahui duduk persoalannya secara objektif. Kerangka teori mengenai perbatasan darat antarnegara digunakan untuk menjelaskan dan sekaligus memperkuat argumentasi sejarah mengenai klaim perbatasan di masa klasik dan implikasinya secara yuridis dalam berbagai kasus perbatasan di masa modern. Kehadiran buku ini diharapkan bisa memberikan sumbangsiah pengetahuan di bidang Hukum Internasional

khususnya dalam aspek teritorial darat di Indonesia baik dari kalangan kampus, dan sekaligus menjadi pengayaan materi ajar di berbagai sekolah, sehingga para pendidik dalam mengajarkan batas dan wilayah perbatasan negara kepada siswa-siswi didik mereka tidak terdistorsi.

**EKOSISTEM MANGROVE KOTA SORONG: Kajian Kondisi Ekosistem, Nilai Manfaat dan Prioritas Pengelolaan** - Roger R. Tabalessy 2023-02-01  
Sumber daya ekosistem mangrove di Kota Sorong terancam rusak jika pemanfaatan yang berlebihan tanpa memikirkan keberlanjutan dari

pada ekosistem itu sendiri, untuk itu dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik agar keberadaan ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk itu perlu menganalisis kondisi ekosistem mangrove, menghitung nilai manfaat langsung sumberdaya ekosistem mangrove dan menganalisis stakeholder yang memiliki prioritas dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Dalam buku ini berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa kondisi mangrove mengalami penurunan dari tahun ke tahun, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sangat rendah, kurangnya kegiatan

monitoring, tidak efektifnya kegiatan konservasi dan tidak efektifnya kegiatan pemantauan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove. Hasil sampling pada empat (4) titik pengamatan menunjukkan INP rata-rata 192,99% untuk jenis *Rhizophora mucronata*, 102,01% untuk jenis *Bruguiera gymnorrhiza* dan untuk jenis *Sonneratia alba* 20%. Nilai guna langsung dari ekosistem mangrove adalah Rp. 165.197.833.491. Prioritas pengelolaan berada pada pemerintah daerah dengan tujuan pengelolaan pada aspek ekologi dengan tetap memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Untuk menunjang

upaya pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan, strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang diusulkan yaitu : 1) Memberdayakan masyarakat pesisir baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada pengelolaan ekosistem mangrove, 2) Mengurangi laju degradasi hutan mangrove, 3) Menekan laju abrasi, intrusi air laut dan perubahan fisik, 4) Memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove jika tetap dilestarikan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan, 5) Memberikan pelatihan, 6) Peningkatan ekonomi

masyarakat, 7) Penentuan kawasan yang tepat dalam pengembangan wilayah, 8) Memperhatikan status kepemilikan lahan, 9) Membuat perda tentang pemanfaatan hutan mangrove, 10) Mencari dukungan dana, dan 11) Membuat bank data ekosistem mangrove. Pengelolaan ekosistem mangrove yang tepat agar menghasilkan suatu ekosistem mangrove yang berkelanjutan di Kota Sorong dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat, pembuatan peraturan daerah yang mengatur pelarangan penggunaan kayu mangrove dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan

menciptakan lapangan kerja baru.

## **PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN -**

Susetiawan 2022-12-15

Buku berjudul 'Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran, Pendekatan, dan Isu Kontemporer' ini merupakan refleksi dari perkembangan ranah pembangunan sosial dan kesejahteraan. Buku ini terdiri dari berbagai artikel yang ditulis oleh para dosen dan peneliti di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Terdapat beragam bahasan di dalamnya mulai dari

metodologi, teori-teori, hingga berbagai tema di ranah pembangunan sosial dan kesejahteraan yang ternyata berkembang dari masa ke masa seturut perubahan masyarakat. Berbagai sudut pandang yang tersaji di dalam buku ini juga mencerminkan variasi pendekatan solutif yang sekiranya sanggup merespons berbagai persoalan yang hadir di dalam masyarakat. Akhirnya, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti dan siapa saja yang berminat dan peduli pada isu-isu pembangunan sosial dan kesejahteraan. Buku ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi mereka yang berminat

untuk mengembangkan ranah keilmuan pembangunan sosial dan kesejahteraan.

*Gerakan sosial untuk konservasi daerah resapan air di kawasan Daerah Aliran Sungai Cisadane di Jabopunjur - 2005*

Conservation of groundwater from Cisadane River in areas of Jabopunjur, an acronym from Jakarta, Bogor, Puncak, and Cianjur.

*Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*

*Kabupaten Banggai Kepulauan - Langgeng*

Wahyu Santosa 2018-05-23

Buku berjudul “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banggai Kepulauan”

merupakan buku karya hasil penelitian yang di dalamnya berisi tentang: (1) Kebijakan Dasar tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) Potensi dan Daya Dukung Sumberdaya Alam, Sumberdaya Hayati, Sumberdaya Manusia, Sosial Ekonomi, dan Budaya; (3) Permasalahan dan Akar Permasalahan yang terjadi pada setiap sumberdaya; dan (4) Rumusan Strategi dan Kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya, serta strategi dan kebijakan



pengembangan sumberdaya manusia, sosial ekonomi, dan budaya untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dirinci ke dalam program-program pembangunan berbasis potensi dan pemecahan permasalahan lingkungan. Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan wilayah yang strategis untuk penerapan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini mengingat wilayah kajian secara geografis termasuk ke dalam kelompok pulau-pulau kecil, dan secara administrasi

merupakan wilayah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan.

#### PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

(DAS) - Jusmy Dolvis Putuhena 2019-06-10

Di Indonesia, fenomena Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis merupakan masalah lingkungan yang cukup serius. Ini dapat dilihat dari data di mana DAS kritis di Indonesia mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Pada 1984 tercatat ada 22 DAS berstatus kritis. Pada 1992, DAS

kritis meningkat menjadi 39 dan pada 1998 menjadi 42. Sementara itu, pada 2000 meningkat menjadi 59 dan pada 2002 naik menjadi 60. Pada 2005 jumlah DAS kritis di Indonesia mencapai 62 DAS dan pada 2008 meningkat menjadi 291. Terjadinya peningkatan DAS kritis ini disebabkan oleh pelbagai faktor, di antaranya penggunaan lahan yang masif untuk berbagai kepentingan, seperti lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan permukiman. Kondisi DAS yang semakin kritis dan luas membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Buku ini hadir meletakkan pengelolaan DAS dalam

paradigma pembangunan yang berkelanjutan. Dalam paradigma ini, pengelolaan DAS tidak dilihat semata dari segi kepentingan ekonomi, akan tetapi juga dilihat dari kepentingan ekologi dan sosial. Di samping itu, dalam paradigma ini, pengelolaan DAS bukan hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang atas sumber daya air, melainkan juga diorientasikan untuk ketersediaan sumber daya air bagi generasi mendatang. Buku ini sangat cocok bagi mahasiswa, dosen, pegiat lingkungan, dan perwakilan pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan DAS maupun sumberdaya

alam lainnya.

*Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju*

*KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan*

*Pembangunan Berkelanjutan - Dona Octavia*

2020-09-01

Pengelolaan hutan secara partisipatif adalah langkah bijak dalam memberdayakan masyarakat desa hutan sebagai pengelola hutan langsung di tingkat tapak. Tingginya ketergantungan masyarakat dan negara pada sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan membutuhkan pengelolaan yang tepat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Sebagai

operator kegiatan pengelolaan hutan di tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki peranan penting dan tidak jarang mengalami banyak tantangan dalam menjalankan tupoksinya. Selain itu, keterbatasan yang dimiliki KPH memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO maupun masyarakat adat dan lokal. Salah satu kebijakan pengelolaan hutan tersebut adalah Perhutanan Sosial (PS), yang merupakan salah satu wujud dari perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari konsep timber base forest management menjadi

community base forest management dengan melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan hutan untuk tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, PS juga merupakan upaya untuk pemulihan kawasan kritis yang mampu memitigasi perubahan iklim melalui konsep agroforestri dalam implementasi rehabilitasi hutan dan lahan yang menjadi bagian reforestasi. Pengelolaan hutan secara partisipatif menuju terwujudnya KPH hijau sejalan dengan apa yang ditargetkan dalam Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Buku ini menyajikan catatan panjang kegiatan dalam kerangka kerjasama antara Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) Regional Project Component 3: “Facilitating the Participatory Planning of community-Based Forest Management Using Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Technologies in Forest Resource Management in the Philippines, Indonesia and Thailand“ dengan dengan Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK). Kegiatan kolaborasi AFoCO – BLI-KLHK selama periode lima tahun (2015 – 2020) bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan informasi dalam melaksanakan pendampingan dan fasilitasi program pengelolaan hutan secara partisipatif di tingkat tapak khususnya di tiga pilot site pada 3 KPH di Indonesia yaitu KPHL Sijunjung, KPHL Batutegei dan KPHL Sikka. Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak\*

Politik lingkungan - Herman Hidayat 2008

Direktori dan informasi adaptasi perubahan iklim - 2012

On climate change adaptation activities in Indonesia.

*Lanskap Sembilang-Dangku: Kontestasi Kepentingan dan Kolaborasi Tindakan* - Rohni Sanyoto 2019-11-14

Buku ini mendiskusikan tentang proses institusionalisasi, kolaborasi multipihak, dan inovasi tata kelola ekologi di lanskap Sembilang–Dangku dalam wadah program

kemitraan KELOLA Sendang (2015-2020)  
**Prosiding Seminar Nasional Peran Pengelolaan  
DAS Untuk Mendukung Ketahanan Air - 2016**  
On watershed management to support  
sustainable water resources in Indonesia; papers  
of a seminar.

*Prosiding Workshop Nasional Pengembangan  
Jejaring Kerja Perguruan Tinggi, Lembaga  
Penelitian, dan Lembaga Diklat di Bidang Hutan,  
Lahan, dan Perubahan Iklim - 2013*

**Tabangun Aceh - Edisi 45 - 2015-04-10**  
Salam Redaksi Rp 11,9 T untuk Peningkatan

Ekonomi Rakyat pada 2016 Pemerintah Aceh  
pada bulan April 2016 PEMERINTAH Aceh pada  
bulan April 2015 membahas arah pembangunan  
2016 melalui Musyawarah Rencana  
Pembangunan (Musrenbang). Pemerintah  
kabupaten/kota se-Aceh bersama pemerintah  
provinsi membahas arah pembangunan Aceh  
2016. Pembangunan tahunan itu tentu harus  
sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang (RPJP) 2012-2032 dan Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  
2012-2017, sehingga pembangunan terarah  
dalam menggapai target. Pembangunan Aceh

pada 2016 terfokus pada lima arah, yaitu: 1. Pengembangan dan revitalisasi kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi Aceh di tingkat global dan regional. 2. Memastikan kemudahan serta mendorong pertumbuhan investasi yang terkait dengan pengembangan agroindustri serta penuntasan akses jalan yang menjangkau wilayah terisolir. 3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran Aceh secara signifikan. 4. Peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan sudah menunjukkan hasil yang nyata. 5. Pencapaian

tujuan pembangunan milenium khususnya pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan tidak hanya dijaga agar tetap konsisten, melainkan juga menjadi daya tarik bagi masyarakat luar dan dalam Aceh sehingga dapat menambah pendapatan Asli Aceh. Dari lima arah pembangunan 2016 di atas hampir semuanya bermuara pada peningkatan ekonomi rakyat. Arah pembangunan nomor urut satu hingga nomor empat sangat jelas mengandung pesan bahwa pembangunan 2016 adalah peningkatan pendapatan ekonomi rakyat melalui program-program pembangunan kawasan-kawasan

strategis, pertumbuhan investasi di bidang agroindustri, penuntasan akses jalan hingga daerah terisolir, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan. Anggaran yang diproyeksikan untuk mencapai arah pembangunan 2016 adalah sebesar Rp. 11.904.101.542.547. Semua instansi terkait di level provinsi dan kabupaten/kota harus mampu memanfaatkan RAPBA 2016 ini untuk dijabarkan dalam wujud program/kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi 6,9% (dari 6,7%

pada 2015), tingkat kemiskinan menjadi 11,5% (dari 16,98% pada 2015), dan pengangguran menjadi 6,8% (dari 7% pada 2015). Disinilah pentingnya Musrenbang untuk penyamaan visi sehingga pembangunan tetap terarah dan semua target yang sudah dituangkan dalam RPJP 2012-2032 dan RPJM 2012-2017 akan tercapai. Semoga!

**Institusi pengelolaan daerah aliran sungai -  
Hariadi Kartodihardjo 2004**

Management of watershed in Jawa Barat, Riau,  
and Nusa Tenggara Barat.

**EROSI DAN KONSERVASI DAERAH ALIRAN**



**SUNGAI** - Andi Setyo Pambudi 2021-07-29

Erosi dan sedimentasi telah dikenal sebagai salah satu isu penting yang mengurangi kapasitas waduk, menghancurkan banyak fasilitas umum dan memengaruhi pengelolaan sumber daya air untuk pertanian, pemenuhan kebutuhan listrik serta memberikan ancaman lingkungan. Erosi juga mengalirkan air yang mengandung tanah, material dan unsur hara ke hilir, sehingga membentuk tumpukan lapisan sedimen tebal yang berakibat pada penyumbatan sungai dan saluran lainnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan banjir. Erosi juga menjadi masalah

di kawasan pesisir (salah satu jenis hilir – outlet DAS/Sub DAS) dalam bentuk abrasi. Erosi yang dipercepat (accelerated erosion) timbul sejak manusia mengenal budidaya pertanian. Erosi menjadi masalah sejak pengelolaan lahan dilakukan secara lebih intensif, sehubungan dengan peningkatan kebutuhan sandang, pangan, papan dan lainnya sejalan dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Sejak beberapa dekade yang lalu erosi diakui secara luas sebagai suatu permasalahan global yang serius. Buku ini akan membuka wawasan pembaca bahwa dalam era modern, perhitungan hidrologi untuk erosi

juga memerlukan aspek lain ketika dihadapkan pada konsep sustainable development. Erosi tidak dapat hanya dipandang dari sisi perhitungan insinyur teknik (engineer) saja, tetapi ada mitigasi budaya dan perhatian pada kepentingan aspek ekonomi yang diwujudkan dalam perubahan paradigma berpikir bahwa dalam rangka optimalisasi kebijakan jangka panjang, sehingga faktor "kepentingan" manusia tidak dapat diabaikan. Hal ini juga berlaku ketika pengambil kebijakan ingin mengurangi laju erosi melalui kebijakan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan

lingkungan dalam satu paket. Dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya alam harus digunakan secara rasional serta diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Pembangunan perlu dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

*Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Henny Warsilah*

Wilayah perbatasan antar-Negara seharusnya menjadi beranda terdepan dari Negara Indonesia, dan tentunya harus memiliki keunggulan dan

daya saing yang mampu meningkatkan keunggulan-keunggulan lokal dan regional sehingga wilayah perbatasan memiliki posisi tawar-menawar ketika berhadapan dengan Negara tetangga. Namun, pada kenyataannya, wilayah perbatasan justru menjadi halaman belakang yang tidak terurus, kondisinya miskin infrastruktur dan masyarakatnya cenderung tertinggal. Sementara itu, wilayah perbatasan Negara tetangga Malaysia dibangun dengan cukup baik, penataan ruang sosial dan ekonominya sangat terintegrasi, penduduk yang mau bekerja dan menetap di wilayah ini disubsidi

oleh Negara, sehingga kondisi ekonomi dan kesejahteraannya sejajar dengan penduduk di perkotaan. Pada posisi Indonesia, wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Kapuas Hulu, ruang fisik dan ruang sosialnya belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, sumber daya alam dan sumber daya manusia belum memiliki daya saing. Seharusnya berhadapan dengan Negara tetangga Malaysia, kita harus mampu mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan dalam bidang yang tidak dimilikinya. Wilayah perbatasan juga mengalami krisis air padahal itu sangat dibutuhkan, karena ketersediaan air merupakan

kebutuhan utama, baik untuk perkebunan, pertanian, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Sumber daya air jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan krisis air di wilayah perbatasan, yang pada akhirnya berimplikasi pada krisis pangan. Kajian dalam buku ini difokuskan pada analisis terhadap ketahanan air untuk kebutuhan pangan masyarakat dan upaya meningkatkan daya saing wilayah. Pendekatan kajian ini kuasi kualitatif dan kuantitatif dengan output berupa model pemberdayaan masyarakat yang dapat direkomendasikan sebagai kebijakan tata kelola air dan kelembagaan air untuk

pangan.

**Warta BAPPEDA - Jawa Barat (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2008**

**Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Wilayah Pesisir - Pitojo Tri Juwono**  
2019-09-30

Air adalah salah satu kebutuhan mendasar bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia.

Sungai sebagai salah satu sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan manusia perlu dijaga dari berbagai desakan dan intervensi pembangunan.

Alur sungai yang dimulai dari hulu menuju hilir

menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara daratan dengan pesisir. Degradasi lingkungan di bagian hulu daerah aliran sungai telah menimbulkan petaka di bagian tengah dan hilir sungai (wilayah pesisir). Optimasi pengelolaan daerah aliran sungai dilakukan dengan reformasi pengelolaan DAS dengan pendekatan integral, menata dan mengatur sempadan sungai, memahami interaksi antara daratan dengan wilayah pesisir untuk mewujudkan pengelolaan

sumber daya air (DAS) dan pesisir yang berkelanjutan.

**Pengelolaan sumberdaya hutan di era desentralisasi - Petrus Gunarso 2009-01-01**

**Prosiding Workshop Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pengembangan Kerangka Kerja REDD+ dan Implementasinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat - 2016**